

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesejahteraan petani

1. Penentu utama kesejahteraan petani

banyak faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat kesejahteraan petani. Di antara faktor-faktor tersebut, yang terpenting adalah tingkat pendapatan petani karena ini berkaitan langsung secara positif terhadap tingkat kesejahteraan petani. Tingkat pendapatan itu sendiri ditentukan oleh dua faktor secara bersamaan yakni harga jual dan volume produksi, jadi dalam kasus petani padi pendapatannya di tentukan oleh harga gabah/beras dan volume padi/gabah yang dihasilkan. Selain itu, banyak petani menggunakan buruh yang umum di sebut buruh tani, maka upah yang di terima buruh tani juga bagian penting dari kesejahteraan petani..

Bagi sektor pertanian lahan atau tanah merupakan input terpenting semua komoditi pertanian tumbuh di tanah. Dalam

teori ekonomi klasik mengenai fungsi produksi, hanya dua input yang dianggap penting yakni lahan dan tenaga kerja, dan memang pada zaman tersebut pertanian merupakan sektor utama atau dominan di dunia. Namun demikian Pemerintah sangat menyadari bahwa salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian adalah lewat peningkatan mekanisme dalam proses produksi.⁵

Menurut Badan Pusat Statistik (2007), indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan Rumah tangga disesuaikan oleh informasi tentang kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi atau pengeluaran Rumah tangga, perumahan dan lingkungan, dan sosial lainnya. Klasifikasi kesejahteraan yang digunakan terdiri dari dua klasifikasi, yaitu rumah tangga dalam kategori sejahtera dan belum sejahtera. Untuk mengukur masing-masing klasifikasi kesejahteraan, ditentukan dengan cara mengurangkan jumlah skor tertinggi dengan jumlah skor terendah. Hasil pengurangan dibagi dengan jumlah klasifikasi atau indikator yang digunakan. Rumus penentuan range skor adalah :

⁵ tulus T.H. tambunan , “*jokowi dan kedaulatann pangan*” (Jakarta: mitra wacana media,2015) 123

$$RS = \frac{SkT - SkR}{JK1}$$

Keterangan :

RS = Range skor

SkT = Skor tertinggi (7 x 3 = 21)

SkR = Skor terendah (7x 1 = 7)

7 = Jumlah indikator kesejahteraan BPS
(kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan,
ketenagakerjaan, pola konsumsi atau pengeluaran
rumah tangga, perumahan dan lingkungan, dan
sosial lainnya)

3 = Skor tertinggi dalam indikator BPS (baik)

1 = Skor terendah dalam indikator BPS (kurang)

JK1 = Jumlah klasifikasi yang digunakan (2)

Hasil perhitungan berdasarkan rumus tersebut diperoleh range skor (RS) sama dengan tujuh, sehingga tingkat kesejahteraan rumah tangga petani jagung adalah sebagai berikut:

(1) Jika skor antara 7–14 berarti rumah tangga petani belum sejahtera.

(2) Jika skor antara 15–21 berarti rumah tangga petani sudah sejahtera.

Menurut definisi BPS, ada 4 jenis penggunaan lahan, yakni sawah, tegal/kebun, lading/huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan

tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat dari pengeluaran rumah tangga per kapita per tahun, yaitu total pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran pangan dan non pangan dalam setahun dibagi dengan jumlah tanggungan rumah tangga. Guna mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga, pengeluaran rumah tangga per kapita per tahun kemudian dibagi dengan harga beras per kilogram. Besarnya pengeluaran per kapita per tahun yang diukur dengan harga atau nilai beras setempat untuk daerah perdesaaan adalah

1) Paling miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun lebih rendah dari 180 kg setara nilai beras/tahun.

- 2) Miskin sekali, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 181–240 kg setara nilai beras/tahun.
- 3) Miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 241–320 kg setara nilai beras/tahun.
- 4) Nyaris miskin, apabila pengeluaran/ kapita/tahun antara 321–480 kg setara nilai beras/tahun.
- 5) Cukup, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 481–960 kg setara nilai beras/tahun.
- 6) Hidup layak, apabila pengeluaran/kapita/tahun lebih tinggi dari 960 kg setara nilai beras/tahun.⁶

2. Nilai tukar petani

Nilai tukar petani adalah rasio antara harga yang diterima petani dan harga yang dibayar petani. Artinya, besar-kecilnya nilai tukar petani selain oleh penghasilan petani juga ditentukan oleh biaya/onkos produksi yang dikeluarkan petani. Dalam tanaman pangan adalah total ongkos/biaya yang dikeluarkan petani untuk usaha satu hektar komoditas tanaman

⁶Dian Komala Sari, Dwi Haryono, Novi Rosanti, “Analisis pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani jagung di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”. *jiia*, vol.2, no.1, (januari 2014)

pangan per-musim tanam yang mencangkupkegiatan produksi hingga kualitas standar (misalnya, untuk padi) dan biaya sewa lahan jika bukan milik sendiri, biaya sewa alat/sarana usaha bukan milik sendiri, biaya upah pekerja jika menggunakan pekerja bukan anggota keluarga, dan biaya bunga kredit modal jika bukan modal sendiri.⁷

Harga gabah/padi yang dibayarkan kepada petani padi sangat menentukan pendapatan para petani, namun yang juga harus diperhitungkan oleh setiap petani adalah tingkat kemampuan/daya beli dari harga atau pendapatannya. Jika seorang petani mendapatkan hasil penjualan gabah/padi

Nilai Tukar Petani yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

⁷Tulus T.H. Tambunan, *Jokowi dan Kedaulatan Pangan*, 138-142.

Sesuai sensus dari BPS, nilai tukar petani diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar oleh petani (Ib). Melalui It, dapat dilihat fluktuasi harga jual hasil produksi petani, sedangkan melalui Ib dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat perdesaan termasuk rumah tangga (RT) petani dan fluktuasi harga barang dan jasa sebagai input yang diperlukan petani untuk produksinya. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani. Nilai tukar petani juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi petani maupun biaya produksi petani. Semakin tinggi nilai tukar petani berarti secara relative semakin kuat daya beli petani. Oleh karena itu, nilai tukar petani dapat digunakan sebagai sebuah alat pengukur alternative tingkat kesejahteraan petani.

3. Upah buruh petani

Berbicara kesejahteraan petani berarti bukan saja kesejahteraan petani tetapi juga kesejahteraan buruh petani, yakni pekerja yang disewa/dipekerjakan oleh petani (baik

pemilik lahan maupun penggarap lahan orang). Besarnya upah yang diterima oleh buruh tani juga sangat menentukan tingkat kesejahteraan buruh tani. Data BPS 2007 menunjukkan bahwa secara nasional, pada April 2007 rata-rata upah nominal buruh tani mengalami peningkatan sebesar 0,17 persen dibandingkan upah maret 2007, yaitu dari Rp 14.932 menjadi Rp 14.957. upah nominal tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,80 persen. Dengan menggunakan data tahun 2007 menunjukkan bahwa secara umum rata-rata upah buruh tani mengalami kenaikan.

Walaupun upah buruh tani cenderung naik terus, pertumbuhannya sering kali lebih rendah dibandingkan pertumbuhan upah riil dan profesi lainnya walaupun pada tahun-tahun tertentu lainnya pertumbuhan upah riil buruh tani lebih baik dibandingkan di sektor-sektor ekonomi lainnya. Pertumbuhan upah riil dipengaruhi oleh dua faktor yakni pertumbuhan upah nominal dan atau laju inflasi.

Inflasi di perdesaan memang salami ini menjadi penyebab merosotnya daya beli atau pendapatan riil masyarakat perdesaan, termasuk upah riil buruh tani, para buruh tani tidak bisa menikmati nilai tambah dari kenaikan upah mereka karena

pada waktu yang bersamaan tingkat inflasi relatif tinggi di pedesaan.

Namun demikian, menurut catatan BPS mengenai inflasi bulanan dan tahunan di provinsi-provinsi di Indonesia, sering juga terjadi kebalikan dari inflasi di pedesaan. Misalnya data BPS januari 2015 menunjukkan bahwa di tingkat nasional indeks harga konsumen (IHK) di pedesaan mengalami penurunan atau deflasi sebesar 0,03 persen dengan IKRT 120,19. Deflasi pedesaan pada bulan tersebut di picu oleh turunnya harga-harga dari sejumlah komoditas yakni bensin, cabai rawit, cabai merah, kacang Panjang, dan ketimun. Serta sewa kendaraan karena tidak ada angkutan umum yang melewati jalan alternative. Sedangkan kondisi logistik yang buruk mengakibatkan inflasi pada umumnya lewat kenaikan harga bahan baku yang pada gilirannya membuat harga jual dari barang jadi yang menggunakan bahan baku tersebut meningkat

8

⁸ Tulus T.H.Tambunan, *Jokowi dan Kedaulatann Pangan*, 143-147.

4. Modal usaha tani

Bagi petani di daerah pedesaan, pembentukan modal sering dilakukan dengan cara menabung (menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk keperluan masa yang akan datang), pemerintah membantu dengan memberikan berbagai macam kredit produksi, namun belum semuanya di manfaatkan dengan baik, baik dari segi sasaran maupun pengelolaan.

Sehubungan dengan pemilikan modal, petani diklasifikasikan sebagai petani besar, kaya, cukupan, dan komersial, serta petani kecil, miskin, tidak cukupan, dan tidak komersial. Dalam pengembangan pertanian, ketersediaan modal dalam jumlah banyak cukup dan tepat waktu merupakan unsur penting dan strategis. Modal dalam bentuk uang tunai sangat diperlukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih dari pada itu untuk membeli sarana produksi pertanian. Misalnya, bibit, pupuk, dan lain-lainya yang memungkinkan petani melakukan proses produksi, yang selanjutnya untuk mendapatkan uang hasil penjualan produk usaha taninya. Sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari Lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan. Sumber

pembiayaan nonperbankan yang telah berkembang, antara lain taskin, agribisnis, modal ventura, laba BUMN, pegadaian, Lembaga keuangan mikro, pola kontrak investigasi kolektif (KIK), dan lain-lain.

Adanya krisis ekonomi, undang-undang No. 23 Tahun 1999, dan Lol antara pemerintah Indonesia dengan IMF mengakibatkan ketersediaan modal dengan suku bunga murah sangat terbatas sehingga kredit untuk usaha agribisnis mengarah ke suku bunga komersial atau bunga pasar. Sumber pembiayaan dari Lembaga nonperbankan dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk usaha argibisnis. Sumber pembiayaan tersebut menerapkan pola kredit dengan suku bunga, bagi hasil, bergulir, dan lain-lain.

Dari beberapa informasi yang diperoleh, petani dan pelaku agribisnis memiliki usaha yang *feasible*, bahkan ada yang mampu membayar harga modal 5-20% perbulan, namun seringkali petani dan pelaku agribisnis tidak *bankable*. Pada prinsipnya, petani dan pelaku agribisnis lebih mengharapkan mekanisme pembiayaan yang mudah jika dibandingkan dengan pembiayaan yang murah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan dan pelaku agribisnis tidak *bankable*, antara lain:

- 1) Tidak adanya kolateral (jaminan), terutama jika berhubungan dengan Lembaga keuangan formal, jaminan yang umum dimiliki adalah tanah, sementara kenyataan menyebutkan bahwa masih banyak permasalahan berkaitan dengan kepemilikan tanah. Secara umum, tidak adanya pengakuan terhadap asset yang dimiliki petani karena tidak adanya bukti hukum terhadap asset-aset tersebut.
- 2) Adanya *track record* yang buruk terhadap Lembaga pembiayaan yang pernah ada, misalnya KUT (kredit usaha tani).
- 3) Sulitnya petani dan pelaku agribisnis lain secara langsung mengikuti formalitas yang diharapkan pihak bank.
- 4) Lembaga keuangan formal kebanyakan tidak mampu, mungkin juga tidak mau atau tidak mengerti dan tidak memahami sifat *nature* dari

kegiatan pertanian, misalnya masalah *gestate period*, hubungannya dengan musim, dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa faktor penyebab tidak *bankable* nya petani dan pelaku agribisnis tersebut maka kendala utama pembiayaan usaha agribisnis adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya bank yang khusus untuk membiayai pertanian (bank pertanian)
- 2) Kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor agribisnis.
- 3) Terbatasnya Lembaga penjaminan kredit untuk sektor pertanian.
- 4) Proses pembelanjaan dari pola *channeling* ke pola *executing*.
- 5) Adanya program pemerintah yang sifatnya bantuan menghambat penyaluran kredit perbankan.
- 6) Kesan perbankan bahwa sektor agribisnis masih *high risk*.

Sehubungan dengan itu strategi pengembangan pembiayaan nonperbankan dalam rangka pengembangan pertanian dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Menyempurnakan kebijakan pembiayaan nonperbankan yang ada sehingga dapat dimanfaatkan lebih baik lagi oleh petani dan pelaku agribisnis.
- 2) Meningkatkan aksesibilitas petani dan pelaku agribisnis terhadap sumber pembiayaan nonperbankan.
- 3) Mensosialisasikan sumber pembiayaan nonperbankan yang telah ada.
- 4) Menjalin kerja sama dengan sumber pembiayaan nonperbankan, baik dalam negeri maupun luar negeri.⁹

⁹ Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010) 98-100

B. Pangan

1. Ketahanan pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya, dan sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran ketahanan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan lain sebagainya.

Ketahanan pangan terwujud apabila secara umum telah terpenuhi dua aspek sekaligus. Pertama adalah tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari kehari.

Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan

nasional. Berdasarkan tersebut maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mereka mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri serta mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan.

Melalui proses pemberdayaan, masyarakat ditingkatkan kapasitasnya agar semakin mampu meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatannya, baik melalui usaha tani maupun usaha lainnya. Peningkatan pendapatan akan menambah kemampuan daya beli, sehingga menambah keleluasaan masyarakat untuk memilih pangan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Peningkatan produksi komoditas pangan oleh masyarakat, di samping meningkatkan ketersediaan pangan dalam rumah tangga juga akan memberikan kontribusi terhadap ketersediaan pangan di daerah yang bersangkutan, yang selanjutnya merupakan kontribusi terhadap ketersediaan pangan nasional.

Bagi kelompok masyarakat tertentu yang rentan terhadap masalah kerawanan pangan seperti golongan miskin, ibu hamil dan anak balita, pemerintah wajib mengupayakan

jaminan akses pangan bagi mereka, agar terpenuhi haknya untuk memperoleh pangan yang cukup.

Pada tataran nasional, inti persoalan dalam mewujudkan ketahanan pangan selama lima tahun terakhir terkait dengan adanya pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. Permintaan pangan meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta perkembangan selera. Dinamika sisi permintaan ini menyebabkan kebutuhan pangan secara nasional meningkat dengan cepat, baik dalam jumlah, mutu, dan keragamannya. Sementara itu, kapasitas produksi pangan nasional terkendala oleh adanya kompetisi pemanfaatan dan penurunan kualitas sumberdaya alam. Apabila persoalan ini tidak dapat diatasi, maka kebutuhan akan impor pangan akan terus meningkat, dan ketergantungan terhadap pangan impor akan semakin tinggi. Ketergantungan impor pangan yang tinggi menimbulkan kerentanan yang dapat berimplikasi negatif terhadap kedaulatan nasional.

Pada tataran rumah tangga, persoalan yang menonjol dalam pemantapan ketahanan pangan adalah masih besarnya

proporsi kelompok masyarakat yang mempunyai daya beli rendah, ataupun yang tidak mempunyai akses atas pangan karena berbagai sebab, sehingga mereka mengalami kerawanan pangan kronis maupun transien. Jika kondisi yang mereka alami ini berkelanjutan, maka bangsa ini akan kehilangan potensi terbaik dari sebagian sumberdaya manusianya.

Pada sisi lain, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) sebagai negara agraris dan maritim. Keunggulan komparatif tersebut merupakan fundamental perekonomian yang perlu didayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*). Dengan pendekatan demikian, perekonomian yang dikembangkan di Indonesia memiliki landasan yang kokoh pada sumberdaya domestik, memiliki kemampuan bersaing yang tinggi. Dalam kaitan ini, pembangunan ekonomi di bidang pangan, baik yang berbasis tanaman, peternakan, perikanan maupun kehutanan, akan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi di bidang pangan ini merupakan prioritas strategis dalam pembangunan nasional.

Memperhatikan permasalahan dan potensi sebagaimana didiskusikan di muka, maka pembangunan ketahanan pangan diarahkan guna mewujudkan kemandirian pangan, untuk menjamin ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga, serta menjamin konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang di tingkat rumah tangga sepanjang waktu; melalui pemanfaatan sumberdaya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Dengan arahan umum tersebut maka kebijakan pembangunan ketahanan pangan adalah sebagai berikut.

Pada sisi ketersediaan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) Meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas sumberdaya alam dan air; (b) Menjamin kelangsungan produksi pangan utamanya dari produksi dalam negeri; (c) Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; dan (d) Meningkatkan kapasitas produksi nasional dengan menetapkan lahan abadi untuk produksi pangan.

Pada aspek distribusi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) Meningkatkan sarana dan prasarana distribus pangan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, termasuk di dalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan dan kerugian akibat distribusi yang tidak efeisien; (b) Mengurangi dan/atau menghilangkan peraturan daerah yang menghambat distribusi pangan antar daerah; dan (c) Mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di pedesaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta mendorong peningkatan nilai tambah.

Dalam hal konsumsi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) Menjamin pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang; (b) Mendorong, mengembangkan dan membangun serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan; (c) Mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan; dan (d) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada golongan

masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil, balita gizi buruk, dsb).¹⁰

Dan apa yang dimaksud dengan pangan itu adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang mampu diolah maupun di olah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terpenting disamping papan, sandang, pendidikan, kesehatan. Karena tanpa pangan tiada kehidupan dan tanpa kehidupan tidak ada kebudayaan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pangan

- a. Tersedianya bahan pangan yang cukup untuk keberlanjutan

¹⁰ Dewan Ketahanan Pangan, “*Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009*”. Jurnal Gizi dan Pangan, vol.1, no.1, (Jul, 2006), 57-63

Dalam aspek ketersediaan pangan, masalah utama yang dihadapi adalah semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi dan daya saing nasional. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor teknis dan faktor social ekonomi.

Faktor teknis meliputi :

- (i) Penyusutan area lahan pertanian,
- (ii) Produktifitas pertanian rendah dan tidak meningkat,
- (iii) Teknologi produksi yang belum efektif dan efisien,
- (iv) Infrastruktur irigasi yang stagnan, tingginya angka kehilangan produk pada penanganan pascapanen, dan
- (v) Kegagalan produksi karena faktor iklim.

Dari aspek sosial ekonomi ialah :

- (i) Penyediaan sarana produksi yang belum terjamin,
- (ii) Kendala peningkatan efisiensi produksi karena laju penurunan luas kepemilikan lahan petani,
- (iii) Belum adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan, (iv) tata niaga produk pangan yang tidak berpihak pada petani,

(v) Terbatasnya devisa untuk impor pangan sebagai alternatif terakhir.

Komponen system pangan yang terdiri atas ketersedianya pangan dengan unsur pendukung produksi, distribusi, dan pertukaran, akses pangan dengan unsur pendukung keterjangkauan finansial, alokasi, dan pilihan. Kegunaan pangan dengan unsur pendukung nilai nutrisi, nilai social, dan keamanan pangan.

Sistem pangan merupakan pilar penyangga ketahanan pangan sehingga keandalan sistem pangan di suatu negara akan menentukan kualitas ketahanan pangan. Ketahanan pangan menggambarkan suatu capaian keadaan dari system pangan yang bekerja sedemikian rupa sehingga semua manusia kapan pun memiliki kemampuan mengakses pangan baik fisik maupun ekonomi secara berkecukupan, aman, dan bergizi untuk memnuhi kebutuhan makan dan pilihan-pilihan pangan yang diperlukan untuk menompang kehidupan yang sehat. Dengan demikian ketahanan

pangan dengan demikian, akan berkurang maknanya apabila sistem pangannya mengalami tekanan. Pengertian ini penting untuk memahami masalah pengembangan teknologi produksi untuk mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.¹¹

b. Mampu membeli alat produksi

Adanya alat produksi pertanian yang di adopsi masyarakat pada prinsipnya berkembang sesuai perkembangan budaya masyarakat, khususnya tingkat keadaran masyarakat petani menerapkan kaidah efisiensi, kualitas, efektivitas, dan ketepatan waktu dalam proses produksi pertanian. Oleh karena itu, usaha perkembangan teknologi di dalam proses produksi pertanian yang meliputi pengelolaan tanah, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat petani untuk menerima teknologi yang baru.

¹¹ Bambang Hendro Sunarminto, *Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015) 144-146.

Dinamika perkembangan teknologi produksi di bidang pertanian dipengaruhi banyak faktor. Sejumlah tantangan seperti rendahnya produktivitas, meningkatnya kebutuhan pangan, perlunya menjaga kelestarian lingkungan, keterbatasan inovasi teknologi, dan ancaman produktivitas akibat perubahan iklim ikut memengaruhi corak perkembangan teknologi produksi pertanian.

Pada saat ini, kedudukan teknologi produksi pertanian di Indonesia dinilai belum cukup efektif dan efisien dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Hal ini tercermin dengan menurunnya kapasitas produksi dan daya saing pangan nasional, sebagai upaya untuk mengatasi penurunan kapasitas produksi, pemerintah melakukan impor bahan pangan dalam jumlah besar,

Pemecahan masalah pengembangan teknologi produksi pertanian agar lebih mampu meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah,

petani, peneliti, pengembang teknologi, dan industri teknologi pertanian. Kerjasama ini diperlukan untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan teknologi produksi yang bersifat strategis terhadap berkelanjutan ketahanan pangan. Kajian ini diperlukan sebagai landasan untuk merumuskan pemikiran yang lebih komprehensif dalam menyusun kebijakan. Hal ini penting untuk menjamin berlangsungnya proses inovasi teknologi produksi yang mampu meningkatkan produksi pertanian secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.¹²

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai jual

a. Waktu kerja para usaha tani

Waktu kerja para usaha tani adalah jumlah kerja yang dicurahkan anggota rumah tangga pada usaha tani, waktu kerja dibagi menjadi curahan waktu kerja suami dan curahan waktu kerja istri. Waktu kerja suami pada usaha tani di pengaruhi oleh waktu kerja suami non usaha tani, biaya tenaga kerja luar keluarga, pengeluaran total rumah tangga, umur suami, dan Pendidikan suami.

¹² Bambang Hendro Sunarminto, *Pertanian Terpadu untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional*, 140-141.

Waktu kerja istri usaha tani di pengaruhi oleh waktu kerja istri non usaha tani, biaya tenaga kerja luar keluarga, pengeluaran, total rumah tangga, dan jumlah anak balita.

b. Biaya waktu produksi

Biaya produksi usaha tani adalah penjumlahan dari biaya tenaga kerja luar keluarga dengan biaya sarana produksi pertanian. Biaya sarana produksi pertanian adalah penjumlahan dari biaya bibit, biaya pupuk, dan biaya peptisida. Biaya tenaga kerja luar keluarga adalah biaya yang digunakan untuk membayar upah tenaga kerja luar keluarga.

c. Produksi

Produksi usaha tani di pengaruhi oleh curahan kerja rumah tangga pada usaha tani, biaya saran produksi, dan luas lahan usaha tani

d. Pendapatan

Pendapatan dari usaha tani dan pendapatan non usaha tani , pendapatan dari usaha tani adalah penerimaan dari usaha tani di kurangi biaya produksi usaha tani.

Penerimaan usaha tani adalah perkalian dari produksi usaha tani dengan harga jual padi/gabah.

e. Pengeluaran

Pengeluaran untuk konsumsi pangan, konsumsi non pangan, investasi produksi, dan investasi Pendidikan. Konsumsi pangan dipengaruhi oleh pendapatan disposibel, pengeluaran selain pangan, dan jumlah anggota rumah tangga. Konsumsi nonpangan dipengaruhi oleh pendapatan disposibel, pengeluaran selain non pangan, dan jumlah anggota keluarga. Investasi produksi dipengaruhi oleh pendapatan disposibel, investasi Pendidikan, dan konsumsi total. Investasi Pendidikan dipengaruhi oleh pendapatan disposibel, konsumsi total, dan jumlah anak sekolah.¹³

4. Ketahanan pangan dalam perspektif islam

Definisi atau pengertian ketahanan pangan versi negara Republik Indonesia telah dirumuskan dalam UU Pangan (Suryana, 2013). Dengan mengacu pada berbagai definisi yang

¹³ Siti Rochaemi dan Erna M Lokollo, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Ekonomi Rumah tangga Petani di Kelurahan Kota Bogor*”. Jurnal Argo Ekonomi, vol.23, no.2, (oktober 2005), 133-158.

berlaku di Indonesia dan di masyarakat internasional, para penyusun UU Pangan merumuskan batasan ketahanan pangan yang di dalamnya merangkum beberapa butir penting sebagai berikut: (1) Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara sampai tingkat perseorangan; (2) Tolok ukur terpenuhinya kebutuhan pangan meliputi berbagai aspek yaitu: (a) Dari sisi kuantitas jumlahnya cukup, (b) Dari sisi kualitas mutunya baik, aman dikonsumsi, jenis pangan tersedia beragam, memenuhi kecukupan gizi, (c) Dari sisi keamanan pangan rohani, pangan harus tidak bertentangan dengan kaidah agama, keyakinan dan budaya masyarakat, serta (d) Dari sisi keterjangkauan ekonomi, pangan tersedia merata ke seluruh pelosok Indonesia dengan harga terjangkau oleh seluruh komponen masyarakat; dan (3) Penyediaan dan keterjangkauan pangan ini dimaksudkan agar masyarakat sampai perseorangan dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.¹⁴ Dalam islam pentingnya penyediaan dan ketahanan pangan dalam kehidupan manusia di tunjukkan dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 47 :

¹⁴Achmad suryana, “*menuju ketahanan pangan indonesia berkelanjutan 2025, tantangan dan penanganannya*”. Jurnal peneliti argo ekonomi, vol.32, no.2, (desember 2014), 123-135.

قَالَ تَزْرَعُونَ نِسْبَةً بَيْنَ أَبَائِكُمْ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُنَّ لِيُحْمَلْنَ إِلَيْهَا لَا يَأْكُلْنَ

لَا مِمَّا تَأْكُلُونَ

Artinya :

“ Dia (yusuf) berkata, agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ddi tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan”, (QS, YUSUF:47).¹⁵

Ketahanan pangan merupakan isu multidimensi dan sangat kompleks, meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Aspek politik seringkali menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan 6 kebijakan pangan. Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menjadi isu dan agenda prioritas dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan berbagai negara dan lembaga internasional.

¹⁵ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Diponegoro, 2012).

pembangunan dalam perspektif islam adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan oleh bangsa, negara dan pemerintah. Pembangunan ekonomi lebih luas dari konsep pembangunan ekonomi konvensional walaupun dasar pembangunan ekonomi Islam adalah multidimensional. Islam mempunyai beberapa dimensi diantaranya dimensi moral, sosial, politik dan ekonomi.

Paradigma sebagai ruang lingkup berpikir dan aktivitas menjadi variabel yang cukup signifikan dalam membedakan paradigma pembangunan ekonomi Islam. Perbedaan cara pandanglah yang memunculkan kesimpulan yang berbeda tentang paradigma pembangunan ekonomi. Dalam konteks pemikiran landasan pembangunan konvensional hanya mendasarkan materialistis, sistem nilai dan etika yang ditawarkan oleh Islam berbeda dengan yang di usung oleh kapitalisme dan sosialisme.

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam, bukan hanya dalam persoalan ekonomi semata melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi materi dan spiritual manusia. Dilihat dari tujuan pokoknya, Islam tidak

melihat pertumbuhan kekayaan sebagai sesuatu yang terpisah dengan cara distribusinya (pemerataan) dan tuntutan realisasi keadilan sosial. Selain itu pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi.

Kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi rakyat akan terwujud, karena politik ekonomi Islam adalah menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat bisa terpenuhi.¹⁶

¹⁶ Juliana, "Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam". *Jurnal Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam*, vol.2, no.2, (Jan 2018), 120-131.

Dalam Islam terdapat beberapa ayat menjelaskan tentang keutamaan dan kewajiban bekerja, diantara:

اللَّهُ فَضْلٍ مِّنْ وَابْتِغُوا الْأَرْضِ فِي فَانْتَشِرُوا الصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَأَذْكُرُوا

“...Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.” (QS. AL-JUMU’AH:10).

Selanjutnya firman Allah

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan izinNya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya

*dan mudahmudahan kamu bersyukur” (QS. AL-JATSYAH :12).*¹⁷

C. Penelitian Terdahulu

1. Tjetjep Nurasa, dan Muchjidin Rachmat (2013). “Nilai Tukar Petani padi di beberapa sentra produksi padi di Indonesia”. Dari analisis nilai tukar subsistem padi (NTS-padi) menunjukkan bahwa secara rata-rata usaha tani padi memberikan kontribusi sebesar 56,42% dalam pemenuhan pengeluaran rumah tangga petani. Pengeluaran untuk makanan merupakan pengeluaran terbesar rumah tangga sedangkan komunikasi merupakan pengeluaran yang terendah, sementara itu dalam biaya produksi, biaya tenaga kerja merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi usaha tani padi, sementara biaya input produksi lainnya (pajak) relative kecil. Nilai tukar petani padi cenderung fluktuatif antar bulan berada paling rendah pada bulan april-mei sejalan dengan masa panen padi dan harga padi pada nilai yang rendah, sedangkan nilai tukar petani padi tertinggi terjadi pada masamaceklik yaitu bulan desember-januari. Kondisi

¹⁷ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahnya*,

inimemberikan implikasi bahwa (a) peningkatan produksi petani tidak selalu diikuti oleh peningkatan NTP dan bahkan cenderung berakibat penurunan NTP karena pengukuran NTP hanya didasarkan kepada rasio harga harga, (b) pentingnya menjaga efektifitas kebijakan harga dasar gabah dalam rangka menjaga stabilitas harga jual padi petani, (c) perlunya pengembangan system pendanaan untuk penundaan masa penjual gabah petani. Peningkatan kesejahteraan petani padi tidak hanya dasar gabah harus selalu disesuaikan sejalan dengan pergerakan harga produk konsumsi .¹⁸

2. Asep Suhendar (2012). ‘Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani tanaman pangan di kawasan Barat Indonesia (periode tahun 2008-2010)’ hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor petani memegang peranan penting di dalam memajukan perekonomian kawasan barat indonesia. Yaitu sebagai penyumbang PDRB ke-3 terbesar dengan rata-rata 17,31% selama tahun 2008-2010. Subsector tanaman pangan sebagai penyumbang terbesar PDRB sector pertanian

¹⁸ Tjetjep Nurasa, dan Muchjidin Rachmat, “*Nilai Tukar Petani Padi di Beberapa Sentra Produksi Padi di Indonesia*”. Jurnal Argo Ekonomi, vol.31, no.2, (oktober, 2013), 161-179

KBI, yaitu rata-rata sebesar 51,58% ternyata memiliki rata-rata nilai tukar petani terendah jika dibandingkan dengan subsector pertanian lainnya, yaitu sebesar 98,04 selama periode tahun 2008-2010. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi sector pertanian, khususnya subsector tanaman pangan tidak memberikan perubahan terhadap peningkatan kesejahteraan petani tanaman pangan di KBI .karena rendahnya indeks nilai tukar petani tanaman pangan (NTPP), dipengaruhi oleh rendahnya rata-rata indeks harga yang di terima petani.¹⁹

3. Mohammad ilham Riyadh (2015) “Analisis Nilai Tukar Petani komoditas tanaman pangan di Sumatera Utara”. Dari analisis nilai tukar subsistem pangan menunjukkan bahwa 376,69% dalam pengeluaran rumah tangga petani. Pengeluaran untuk sandang merupakan pengeluaran terkecil rumah tangga sedangkan makanan merupakan pengeluaran yang terbesar. Sedangkan nilai tukar subsistem pangan terhadap produksi menunjukkan bahwa biaya pupuk dan biaya upah tenaga kerja merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi usaha tani

¹⁹ Asep Suhendar. *Aanalisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Kawasan Barat Indonesia (Periode Tahun 2008-2010)*”

pangan. Faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar petani di Sumatera Utara adalah: produktivitas hasil, luas lahan, biaya tenaga kerja, harga komoditas, dan harga pupuk.²⁰

D. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata “hypo” yang berarti “di bawah” dan “thesa” yang berarti “kebenaran”. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.²¹

Hipotesis yang diajukan penelitian ini adalah ;

1. Nilai tukar petani

H_{01} = Diduga variabel (x) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel (y)

²⁰ Mohammad Ilham Riyadh. *Analisis Nilai Tukar Petani Komoditas Tanaman Pangan di Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Public, vol.6, no.1, (juni 2015), 17-32.

²¹ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, 64

H_{02} = Diduga variabel (x) berpengaruh signifikan terhadap variabel (y)

2. Ketahanan pangan

H_{01} = Diduga variabel (x) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel (y)

H_{02} = Diduga variabel (x) berpengaruh signifikan terhadap variabel (y)